

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan pasar dengan pertumbuhan *e-commerce* yang menarik dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2014, *Euromonitor* mencatat, penjualan *online* di Indonesia sudah mencapai US\$1.1 miliar. Data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyebut, industri *e-commerce* Indonesia dalam 10 tahun terakhir meningkat hingga 17 persen dengan total jumlah usaha *e-commerce* mencapai 26,2 juta unit.

Selama kurun waktu 4 tahun terakhir, *e-commerce* di Indonesia mengalami peningkatan hingga 500 persen. Riset terbaru google dan termasuk dalam Laporan e-economy SEA 2018 menunjukkan bahwa ekonomi digital di Indonesia tahun ini mencapai US\$27 Miliar atau sekitar Rp. 392 triliun. Angka tersebut menjadikan transaksi ekonomi digital Indonesia berada di peringkat pertama untuk Kawasan asia Tenggara dengan kontribusi sebesar 49 persen. (wartaekonomi.co.id 2019)

Tingginya transaksi ekonomi digital berbanding lurus dengan meningkatnya peluang bisnis jasa pengiriman barang. Berjamurnya perusahaan jasa pengiriman membuat persaingan dibisnis ini semakin ketat, setiap perusahaan jasa pengiriman berlomba-lomba menawarkan pelayanan terbaiknya.

PT. Pos Indonesia (Persero) merupakan BUMN yang bergerak dalam jasa pengiriman barang. Sebagai perusahaan besar dan sudah berpengalaman dalam hal pengiriman barang serta mempunyai jaringan terluas diseluruh Indonesia, PT.

Pos Indonesia (Persero) seharusnya dapat menguasai market pengiriman barang. Namun pada kenyataannya *market share* pengiriman barang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan swasta.

Melihat permasalahan tersebut PT. Pos Indonesia (Persero) harus mencari berbagai macam cara strategi agar dapat menghadapi segala risiko dan permasalahan eksternal maupun internal, sehingga dapat menunjang keberlangsungan hidup perusahaan. Masalah eksternal perusahaan diantaranya inflasi, meningkatnya tingkat suku bunga, pesaing (kompetitor) dan lain sebagainya, sedangkan masalah internal perusahaan diantaranya kurangnya modal kerja, teknologi yang kurang memadai, hubungan baik dengan *stakeholder* dan (*fraud*).

Sebagai Perusahaan, PT. Pos Indonesia (Persero) mempunyai tujuan untuk menghasilkan laba. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu caranya adalah perusahaan harus dapat mengelola harta/kekayaan secara efektif dan efisien serta menjaga harta/kekayaan perusahaan dari segala bentuk (*fraud*) yang dilakukan oleh karyawannya. Berdasarkan hasil penelitian *Associatin of certified fraud examiners* (ACFE) global menunjukkan bahwa setiap tahun terata 5% dari pendapatan organisasi menjadi korban *fraud*. Menurut survei ACFE Indonesia (2016), *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi.

Oleh karena itu manajemen membutuhkan fungsi pemeriksaan intern atau yang lebih dikenal dengan sebutan internal audit. Dalam perusahaan, internal audit harus memastikan seberapa jauh perusahaan dapat terlindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk *fraud*, pencurian maupun penyalahgunaan harta/kekayaan

perusahaan karena hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Keberadaan fungsi audit internal sangat penting bagi perusahaan baik perusahaan swasta atau publik. Namun, kebutuhan akan fungsi pengawasan audit internal sangat bervariasi tergantung dengan besaran atau skala perusahaan, keragaman dan kompleksitas kegiatan perusahaan. Jumlah karyawan, serta pertimbangan biaya atau manfaat. Selain itu pentingnya keberadaan fungsi audit dalam perusahaan dapat menunjukkan dan mencegah penyelewengan dan indikasi *fraud* oleh manajemen dalam menjalankan operasi perusahaan, sehingga keberadaan fungsi audit internal sangat penting bagi perusahaan. Walaupun fungsi pemeriksaan intern atau internal audit telah dibentuk namun masih terjadi beberapa *fraud* di PT. Pos Indonesia (Persero).

Diantaranya kasus penyimpangan dalam penggunaan/pengeluaran biaya tambahan distribusi kartu perlindungan sosial (KPS). Senin 5 juni 2017, jaksa penuntut umum eryanto dalam sidang yang gelar di pengadilan tipikor bandung menuntut mantan senior vice president operasi pt pos indonesia, zulkifli assagap dengan tuntutan 18 bulan penjara. Selain Zulkifli, vice president pengendalian sistem operasi PT. Pos Indonesia pamungkas tedjo asmoro dan mantan vice president kolekting dan antaran PT. Pos Indonesia arjuna juga dituntut hukuman yang sama.

Menurut jaksa Eryanto, ketigannya terbukti melakukan penyimpangan dana. Penyimpangan itu dalam penggunaan/pengeluaran biaya tambahan distribusi kartu perlindungan social (KPS) di PT. Pos Indonesia senilai Rp.2,4 miliar. Jaksa menilai mantan pejabat PT. Pos Indonesia tersebut telah memperkaya diri sendiri

atau orang lain yang tidak berhak untuk menerima dana biaya tambahan dalam pendistribusian KPS tahun 2013.

Akibatnya terdapat kerugian sebesar Rp. 2,4 miliar. kasus ini berawal dari proyek kartu perlindungan sosial (KPS) tahun 2013. Dalam proyek puluhan miliar itu dikeluarkan biaya pendistribusian KPS yang ditandatangani Zukifli Assagap. Distribusi tersebut disebar ke kantor area operasi. dalam biaya tambahan itu terjadi penyimpangan. Untuk area VI Semarang, dari biaya Rp. 1,8 miliar itu terjadi penyimpangan Rp. 769 juta. Kemudian penyimpangan uang lainnya bervariasi hingga jumlahnya mencapai Rp. Miliar. Uang untuk pengeluaran biaya tambahan distribusi KPS itu tidak sesuai kebutuhan riil sehingga mengakibatkan kerugian negara.

Pada tahun yang sama, Kejaksaan Agung juga telah membongkar kasus pengadaan PDT (*Portable Data Terminal*) dari hasil penghitungan BPKP ditaksir kerugian negara kasus ini mencapai Rp. 9,56 miliar ada lima tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah direktur utama PT. Pos Indonesia Budi Setiawan, karyawan PT Datindo Infonet Prima Effendy Christina dan Muhajirin selaku penanggung jawab satuan tugas pemeriksa dan penerima barang di PT. Pos Indonesia Bandung. Selain ada pula Senior Vice President Teknologi Informasi PT. Indonesia Budi Setyawan.

Kasus ini telah disidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Kasus Korupsi, Senin 26 Oktober 2015, majelis hakim menjatuhkan vonis 1 tahun penjara terhadap seluruh terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat *Portable Data Terminal* (PTD) di PT Pos. Selain vonis kurungan, para terdakwa juga diyakini

diwajibkan membayar denda Rp. 100 juta subsidi satu bulan kurungan. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa seluruh terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi pada dakwaan primer, namun terbukti melanggar pasal 3 uu nomor 31 tahun 1999 pasal 18 tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

Sementara tim kuasa hukum PT. Pos Indonesia (Persero) menyatakan akan mengajukan banding atas putusan terhadap bekas pejabat PT Pos tersebut. kasus pengadaan PDT (*Portable Data Terminal*) berawal dari proyek pengadaan alat PDT yang dicanangkan pada Mei hingga Agustus 2013. Alat yang bentuknya mirip telepon gengam itu akan digunakan pengantar Pos untuk mengirim barang kepada penerima. Nantinya, data yang berasal dari pengantar Pos tersebut akan terkirim ke sever pusat. PT Pos menjalin kontrak dengan PT Datindo Infonet untuk pengadaan alat tersebut. Untuk pengadaan itu PT pos mengeluarkan dana hingga Rp. 10,5 miliar. Dana itu didapat PT Pos dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun kendala terjadi dari 1.725 alat PDT (*Portable Data Terminal*) yang dibeli hanya 50 alat yang berfungsi, dan alat tidak sesuai spesifikasi yang tertera dalam kontrak. Salah satu kekurangan dalam alat tersebut adalah tidak adanya GPS dan daya baterai yang hanya bertahan selama tiga jam. Padahal dalam kontrak, harusnya alat tersebut memiliki GPS dengan daya tahan baterai mencapai delapan jam. Yedi Supriadi (5 Juni 2017), pikiran.rakyat.com.

Beberapa kasus *fraud* yang terjadi mengindikasikan bahwa masih kurangnya pengendalian intern sehingga masih memungkinkan terjadinya *fraud* baik yang dilakukan oleh karyawan maupun yang dimanfaatkan oleh pihak lain. Untuk menangani masalah *fraud* ini diperlukan suatu pengawasan/monitoring. Untuk mendapatkan hasil pengawasan yang baik, diperlukan audit internal yang baik. Audit internal yang baik dapat mendorong pencegahan *fraud* yang baik dan efektif sehingga kemungkinan terjadinya *fraud* dapat diperkecil.

Keefektifan audit internal mempunyai pengaruh yang besar dalam pencegahan terjadinya *fraud*, dengan adanya audit internal maka pengecekan akan terjadinya secara otomatis terhadap pekerjaan seseorang oleh orang lain. Audit internal yang profesional akan berpengaruh besar dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas didalam suatu organisasi yang tentunya akan sangat membantu manajemen dalam menghadapi pesaing bisnis.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian guna mengetahui peranan audit internal dalam mencegah terjadinya *fraud* pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung. Maka dari itu, peneliti memutuskan judul untuk penelitian ini adalah **“Peranan Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*)” (Studi Kasus Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya peran audit internal pada PT. Pos Indonesia (Persero)

KCU Bandung dalam pencegahan kecurangan *fraud*.

2. Masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang menimbulkan kerugian bagi PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Seberapa besar pengaruh audit internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengembangkan wawasan penulis dan memperoleh data-data informasi yang mendukung mengenai pengaruh audit internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) sebagai bahan dalam penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Adapun tujuan penelitian ini adalah: ununtuk mengetahui seberapa besar pengaruh audit internal terhadap pencegahan kecurangan *fraud* pada PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu akuntansi dan menambah kajian ilmu akuntansi khususnya dibidang ilmu auditing untuk dijadikan acuan bagi civitas akademik dan acuan bagi penelitian selanjtnya.

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya ilmu audit dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan terapan dan memberikan informasi serta gambaran yang jelas mengenai pengaruh audit internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

1.5.2 Kegunaan Praktis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh audit terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada berbagai pihak, serta sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjutan.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Salah satu cara meningkatkan kinerja perusahaan adalah dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu caranya adalah mencegah (*fraud*) dimana pihak yang memiliki peranan penting adalah audit internal.

Sukrisno Agoes (2018;218) mendefinisikan “**Internal audit (pemeriksaan internal) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit Perusahaan, terhadap Laporan keuangan dan catatan akuntansi Perusahaan maupun ketaatan terhadap**

peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku”.

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa audit internal adalah aktivitas yang independent, objektif dan aktivitas pemberi keyakinan yang memadai dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan kegiatan organisasi. Fungsi audit internal menjadi sangat penting sejalan dengan semakin kompleksnya operasional perusahaan. Manajemen tidak mungkin dapat mengawasi seluruh kegiatan operasional Perusahaan, oleh karena itu manajemen sangat terbantu oleh fungsi audit untuk menjaga efesiensi dan efektivitas kegiatan. Sedangkan tujuan audit internal menurut Hery (2018:39) adalah:

“Audit internal secara umum memiliki tujuan untuk membantu segenap anggota manajemen dalam menyelesaikan tanggungjawab mereka secara efektif, dengan memberi mereka analisis, penilaian, saran, dan komentar yang objektif mengenai kegiatan atau hal-hal yang diperiksa”.

Tujuan pemeriksaan yaitu untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksa.

Audit internal dalam melaksanakan aktivitasnya harus sesuai dengan standar profesi audit internal. Menurut **Hiro Tugiman (2018;16)** Standar Profesional Audit internal meliputi:

1. **Independensi**
2. **Kemampuan profesional**
3. **Lingkup pekerjaan audit internal**
4. **Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan**
5. **Manajemen bagian audit internal**

Menurut Tuanakotta (2018:188)

“*fraud* adalah kejahatan yang dapat ditangani dengan dua cara, mencegah dan mendeteksi. Para ahli memperkirakan bahwa (*fraud*) yang terungkap merupakan bagian kecil dari seluruh (*fraud*) yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, Upaya utama seharusnya pada pencegahan”.

Fraud dapat terjadi disegala ini perusahaan, sehingga diperlukan bentuk usaha dari perusahaan untuk dapat mencegah terjadinya (*fraud*). Maka peran penting dari audit internal dalam mencegah kecurangan (*fraud*) yaitu dengan menghilangkan dan menekan segala potensi yang akan mengawali terjadinya (*fraud*).

1.6.2 Kerangka Pemikiran

Dari landasan teori yang dipaparkan diatas kemudian digambarkan dalam kerangka penelitian “Pengaruh Audit Internal Terhadap Pencegahan (*fraud*)”.



Gambar 1. 1: kerangka pemikiran

Menunjukkan bahwa variable independent dalam penelitian ini adalah audit internal serta yang menjadi variable dependen dalam penelitian ini adalah pencegahan kecurangan (*fraud*).

1.6.3 Penelitian terdahulu (*studi Empiris*)

Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian menunjukan kepada jurnal ilmiah akuntansi dan hasil penelitian terdahualu. Untuk lebih rinci referensi yang diambil dapat dilihat table bawah ini:

Tabel 1. 1
Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Judul | Hasil |
|----|--|---|---|
| 1 | (M. Dandriansyah, Elly Suryani dan Galuh Tresna Murti, 2023) | Pengaruh Audit Internal dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Kasus pada PT. Perkebunan Sumatera Utara) | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengujian hipotesis secara simultan mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh signifikan pada variabel audit internal dan pengendalian internal secara simultan terhadap pencegahan kecurangan. Pengujian hipotesis mengungkapkan bahwa secara parsial audit internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan pada perusahaan PT. PSU. Pengujian hipotesis mengungkapkan bahwa secara parsial pengendalian internal berpengaruh signifikan |

| No | Nama Peneliti | Judul | Hasil |
|----|---|---|---|
| | | | terhadap pencegahan kecurangan pada PT. PSU. |
| 2 | (Muhammad Akhtar, Kartini, Ratna Ayu Damayanti, 2022) | Pengaruh Audit Internal dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Pendeteksian Kecurangan (<i>Fraud</i>) | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Audit internal berpengaruh tidak signifikan terhadap pendeteksian kecurangan (<i>fraud</i>). Efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan (<i>fraud</i>). Audit internal dan efektivitas pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan (<i>fraud</i>). |
| 3 | Itep Kustiana, (2018) | Pengaruh Audit Internal Terhadap Pencegahan (<i>Fraud</i>) (Studi Kasus Pada PT. | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran audit internal berpengaruh terhadap pencegahan (<i>fraud</i>) |

| No | Nama Peneliti | Judul | Hasil |
|----|--|--|---|
| | | Kereta Api Indonesia (Persero) | Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero). |
| 4 | (Elsa Putri A, Erma Junita S, Haikal Pradika A, Novi K, 2022) | Peran Audit Internal dalam Pencegahan <i>Fraud</i>) | <p>Penelitian ini menganalisa bagaimana pentingnya audit internal dalam pencegahan kecurangan atau (<i>Fraud</i>), dari penjelasan diatas audit internal sangat memberikan pengaruh dalam mengatasi kecurangan atau (<i>Fraud</i>). Seperti halnya <i>Fraud</i> terjadi karena beberapa hal seperti masalah pribadi, peluang untuk melakukan kecurangan, dan rasionalisasi yang sesuai dan mendukung keadaan untuk melakukan kecurangan. Oleh karena itu meneliti bagian dalam perusahaan itu penting dengan melakukan beberapa metode dan tindakan seperti memeriksa</p> |

| No | Nama Peneliti | Judul | Hasil |
|----|--|--|---|
| | | | <p>beberapa laporan keuangan. Karena adanya kecurangan atau (<i>fraud</i>) umum terjadi dalam perubahan laporan keuangan.</p> |
| 5 | (Saela Safitri, Puji Rahayu, Yani Aguspriyani, 2024) | Peran Internal Audit dalam Mendeteksi Kecurangan pada Perbankan Syariah di Indonesia | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Auditor Internal memiliki peran yang signifikan dalam mendorong auditor untuk lebih efektif dalam mendeteksi kecurangan, dan salah satu aspek pentingnya adalah independensi. Keberhasilan Auditor Internal dalam menjalankan tugasnya dapat menjadi faktor yang mandiri untuk mendeteksi kecurangan.</p> |
| 6 | (Rina, 2020) | Pengaruh audit internal terhadap pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>) | <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Audit internal memberikan pengaruh besar terhadap pencegahan (<i>fraud</i>) sedangkan sisanya dipengaruhi</p> |

| No | Nama Peneliti | Judul | Hasil |
|----|---------------|-------|---|
| | | | oleh faktor lain. Sementara hubungan antara audit internal dengan pencegahan (<i>fraud</i>) memiliki hubungan yang sedang antara kedua variable tersebut. |

1.6.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019:63) Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Disebut sementara karena jawaban tersebut baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang ada diperoleh melalui bukti pengumpulan data.

Dalam pernyataan ahli tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya.

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan diatas, maka hipotesis yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian ini adalah “**audit internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud***”.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.7.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor

Cabang Utama Bandung, yang beralamat Jalan Asia Afrika, No.49 Braga, Kec. Sumur Bandung.

1.7.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan mei sampai Agustus.

